

**STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGATASI
KEMISKINAN DI DESA TELUK PULAI KECAMATAN
PASIR LIMAU KAPAS**

PROPOSAL

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Serjana Sosial (S.Sos)

Oleh

SUPRIZAL R

NIM: 13154047

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**

MEDAN

2019

**STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGATASI
KEMISKINAN DI DESA TELUK PULAI KECAMATAN
PASIR LIMAU KAPAS**

PROPOSAL

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Serjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Suprizal R

13154047

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

H. M. Iqbal Muin Lc. MA
NIP. 19620925 199103 1 002

Dr. Salamuddin, MA
NIP. 197407 19200701 1 014

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suprizal R
NIM : 13154047
Jurusan/Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam/ S.I
Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi
Kemiskinan Di Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir
Limau Kapas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang sudah saya jelaskan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya saya ucapkan terimakasih,.

Medan, November 2019

Yang buat pernyataan

Suprizal R

13154047

Nomor : Istimewa Medan, November 2019
Lampiran : - Kepada Yth:
Hal : Skripsi Bapak Dekan Fakultas Dakwah
An. Suprizal R dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran dan masukan seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Suprizal R yang berjudul: **Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Serjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Meda.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsi dalam sidang muaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam

Pembimbing I

pembimbing II

H. M. Iqbal Muin Lc. MA

Dr. Salamuddin. MA

NIP. 19620925 199103 1 002

NIP. 197407 19200701 1 014

STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI DESA TELUK PULAI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

Suprizal R

Suprizalro607@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh inovasi-inovasi yang dilakukan desa untuk memberikan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Strategi yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan di DesaTeluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, (2) Dampak dari strategi mengatasi kemiskinan yang digunakan.

Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri dari perangkat desa Teluk Pulau. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan deokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan adalah pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan usaha kerja, masyarakat di ajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Kata kunci: Strategi Mengatasi Kemiskinan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Masyarakat Miskin Di Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen.

Saya menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amiin.

Medan, 22 Mei 2019

Penulis

SUPRIZAL R

NIM: 14154047

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumus Masalah.....	4
D. Batasan Istilah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Pengertian Strategi.....	10
B. Pemerintah Daerah.....	11
C. Pemerintah Desa.....	13
D. Konsep Desa.....	15
E. Masyarakat Miskin.....	15
F. Strategi Mengatasi Kemiskinan perspektif Islam.....	25
G. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	30
H. Mengatasi Kemiskinan.....	31
I. Teori mengatasi Kemiskinan.....	33
J. Penelitian terdahulu.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
B. Metode Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Waktu dan Tempat Penelitian	45
E. Informan Penelitian.....	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis data dan Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Strategi Pemerintah Daerah Pasir Limau dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau.....	51
B. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Kecamatan Pair Limau Kapas Desa Teluk Pulau	55
C. Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
Daftar Pustaka.....	63
Lampiran	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial. Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang ironis.¹

Sedangkan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas sendiri tingkat garis kemiskinan mencapai 580 KK ini terjadi didasarkan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai ketidaktetapan pekerjaan seperti buruh, petani, nelayan, serta masih banyaknya pengangguran di desa Teluk Pulau. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka seharusnya pemerintah desa harus bisa mengatasi kemiskinan.

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 22

Kemiskinan yang terjadi pada nelayan dikepenghuluan tersebut berdasarkan hasil penelitian disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dicirikan rendahnya tingkat pendidikan nelayan sehingga membuat rendahnya produktivitas yang berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan yang diterima nelayan. Menghadapi kondisi semacam ini tidak lantas membuat para nelayan berputus asa dan menyerah, dengan segenap pengetahuan dan kemampuannya pada nelayan terus berusaha untuk melakukan strategi bertahan hidup yang tepat.²

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kemiskinan di Desa Teluk Pulai dan mengetahui tindakanyang akan dilakukan Pemerintah Desa Teluk Pulai dalam mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai ‘miskin’ dan mereka yang masuk golongan ‘fakir’, orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan

²*Ibid*, hlm. 12

primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.³

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Mengatasi kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas.

³Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 3

⁴Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 206

B. Identifikasi Masalah

Berbagai penjabaran dengan uraian sebelumnya, maka sebuah pembahasan yang diangkat dalam pengidentifikasian masalah adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah harus mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomian dan membangun daya masyarakat dengan memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Masalah ekonomi merupakan bagian penting untuk pemerintah, karena ekonomi dapat membebaskan masyarakat dari miskin, penindasan dan kebodohan. Ekonomi merupakan kegiatan untuk membuat anggota keluarga memiliki life skill dan mampu menghasilkan pendapatan ekonomi keluarga.

C. Rumus Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka perumusan permasalahan yang akan diteliti adalah.

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau?
2. Bagaimana hasil yang dicapai pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas mengatasi kemiskinan?
3. Bagaimana Hambatan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau ?

D. Batasan Istilah

Permasalahannya yang akan diteliti ini adalah strategi pemerintah desa dalam mengatasi masyarakat miskin di Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas. Namun sebuah penelitian memerlukan adanya pembatasan masalah agar penelitian ini berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan. Pembatasan ini dapat memberikan gambaran kemana arah dan fokus penelitian yang memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu mencapai tujuan dengan dengan tepat. Strategi pada hakikatnya belum mengarah pada berbagai hal yang bersifatnya praktis, tetapi masih berupa rencana atau gambaran yang menyeluruh.

Strategi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Strategy ini pada dasarnya adalah berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *strategia* yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “seni pemimpin pasukan, komando, jenderal”. Hingga abad ke 20, istilah strategi ini sering digunakan untuk mencapai tujuan politik, termasuk dalam mengatasi ancaman dan penggunaan kekuatan serta sumber daya yang tersedia.⁵

⁵Kamus Pelajar, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 723

2. Mengatasi

Kemiskinan sebagai standar tingkat hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶ Tolak ukur umum yang digunakan adalah tingkat pendapatan perwaktu kerja, kebutuhan relatif per keluarga termasuk untuk sandang, pangan,papan.

Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat miskin tidak selalu di pandang rendah karena mereka bisa diberdayakan. Masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat.⁷

3. Kemiskinan

Dalam kamus *Besar Bahasa Indonesia*, kata “miskin” diartikan sebagai berharta benda, serta kekurangan (berpengasilan rendah). Dari bahasa asli *Bahas Arab* kata “miskin” diambil dari kata *sakana* yang berarti *diam* atau *tenang*. Menurut pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan seseorang yang serba tidak berkecukupan untuk menutupi kebutuhan pokoknya.⁸ Sedangkan masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki

⁶Kamus Pelajar, *Ibid*, hlm. 148

⁷Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Parktik*,(Jakarta: Penerbit Kencana, 2013),hlm. 24

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1991), hlm. 422

akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang kecil dan tidak mencukupi seharai-hari.

E. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui :

1. Strategi Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau
2. keberhasilan pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas mengatasi kemiskinan.
3. hambatan pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas mengatasi kemiskinan

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai masukan, pegangan, pertimbangan dan evaluasi bagi peningkatan pemerintah dari pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Pengembangan Masyarakat Islam dan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian serupa secara lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan serta digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- b. Bagi pemerintah desa Kecamatan Pasir Limau Kapas sebagai bahan pertimbangan bagi dalam penyusunan program mengatasi kemiskinan khususnya di Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas
- c. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Islam Negeri, khususnya Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian tesis bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara utuh, menyeluruh dan sistematis yang ditulis oleh peneliti, sehingga akan mudah dibaca dan dipahami dari hasil penelitian ini. Agar mudah dibaca dan dipahami tesis ini akan disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka.

BAB II tentang teori yang terkait tentang kemiskinan dan strategi mengatasi kemiskinan.

BAB III berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Gambrn umum tentang Kecamatan Pasir Limau Kapas Desa Teluk Pulau

BAB IV menjelaskan tentang strategi mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dianggap bermanfaat.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos*, artinya keseluruhan usaha, termasuk pemahaman atas perencanaan, cara, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi dapat dipahami sebagai garis besar panduan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi juga dapat dipahami sebagai rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu mencapai tujuan dengan dengan tepat. Strategi pada hakikatnya belum mengarah pada berbagai hal yang bersifat praktis, tetapi masih berupa rencana atau gambaran yang menyeluruh.⁹

Strategi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Strategy ini pada dasarnya adalah berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *strategia* yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “seni pemimpin pasukan, komando, jenderal”. Hingga abad ke 20, istilah strategi ini sering digunakan untuk mencapai tujuan politik,

⁹Priansa Juni Donni, *Pengembangan Strategi Dan Model Pembelajaran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 87-88

termasuk dalam mengatasi ancaman dan penggunaan kekuatan serta sumber daya yang tersedia.¹⁰

B. Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu sebagai atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Demikian salah satu bunyi UUD 1945 hasil amendemen pada Bab VI Pasal 18 ayat 1. Selanjutnya, masih dalam UUD 1945 hasil amendemen pada Bab VI Pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa “ Gubernur, Bupati, dan wakil kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.¹¹

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf b: “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi” Pasal 1 huruf c: “Pemerintahan

¹⁰*Kamus Pelajar, Ibid*, hlm. 723

¹¹Rudito Bambang, *Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama 2016), hlm.

daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.¹²

Perubahan lain adalah terdiri dari susunan pemerintahan daerah, dulu berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, Pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, sedangkan menurut UU No. 22 tahun 1999 Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sementara DPRD disebut sebagai Badan Legislatif Daerah.¹³

Menurut David Apter (1977) pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹⁴

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintahan dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.¹⁵

Menurut Wilson (190: 572) pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh

¹²*Ibid.*, hlm. 92

¹³Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: PT Alumni 2004), hlm. 192-193

¹⁴Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: RefikaAditama, 2010), hlm.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 11

sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik publik.¹⁶

C. Pemerintahan Desa

Menurut Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang disebut Pemerintahan Desa ialah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena otonomi daerah berbeda dengan otonomi desa, maka ketentuan tersebut tidak dapat dianalogikan dengan atau buat Pemerintah Desa.¹⁷

Maka dapatlah dikatakan bahwa yang di maksud dengan Pemerintahan Desa sebagai alat Pemerintah ialah satuan organisasi terendah Pemerintah (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, baiklah kita lihat Pasal 18 UUD 1945, dengan penjelasannya, dan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah didaerah, yang pelaksanaannya diatur dengan Instruksi menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan meningkat dasar permusyawaratan

¹⁶Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2001), hlm. 2

¹⁷Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 24

dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹⁸

Penjelasan Pasal 18, I, UUD 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Daerah Indonesia dibagi menjadi daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.

Sebagai penyelenggara Negara pemerintah wajib menjalankan amanah Undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan. usaha-usaha yang dilakukan khususnya pemerintah daerah dituangkan dalam program-program strategis untuk mengatasi masyarakat kemiskinan. Otonomi daerah memberikan peran yang nyata pada Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota untuk mengelola daerahnya di berbagai bidang, termasuk diantaranya program mengatasi kemiskinan.

Hall dan Midgley menyatakan "Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat".¹⁹

¹⁸*Ibid.*, Hlm 25

¹⁹*Ibid.*, Hlm 26

D. Konsep Desa

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat.

Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni desa, dusun yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebut bahwa desa adalah:

1. Kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, atau dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
3. Tempat, tanah dan daerah.

E. Masyarakat Miskin

1. Defenisi Kemiskinan

Secara etimologi, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yaitu tidak berharta benda dan serta serba kekurangan. Departemen sosial dan biro statistik, mendefinisikan dari perspektif kebetulan dasar. Kemiskinan sebagai ketidak

kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak. Menurut Nurhadi, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standart kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*pocertyline*).

Garis kemiskinan adalah sebuah jumlah rupiah yang diperlukan setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan secara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan dan non makanan yang berdiri dari tempat tinggal, kesehatan, pakaian, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.²⁰

1. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang global, berarti kemiskinan menjadi suatu aspek penting bagi seluruh dunia. Berbagai Negara pastinya tidak terlepas dari kemiskinan dan kemiskinan itu sendiri adalah salah satu penyakit bagi dunia kemanusiaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.²¹

Kemiskinan merupakan kondisi absolute dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tatanilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumberdaya alam maupun sumber manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh sebagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam

²⁰Zubaedi., *Ibid.*, hlm. 103

²¹Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 14

pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenal dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.²²

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Sujogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standart kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang buat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Kemiskinan adalah tidak tercapainya kebutuhan primer seperti kelaparan, sakit yang berkepanjangan karena ketiadaan biaya untuk pengobatan, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan jadi pengemis. Menurut pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan menurut tadjuddin, yang membagi kemiskinan dari beberapa aspek dengan variasi yang berbeda, yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan politik, dan kemiskinan sosial.²³

a. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan

²²Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan*, (Malang : Intrans Publishing, 2013), hlm. 20

²³Zubaedi, *Ibid.*, hlm 104

kesejahteraan sekelompok orang sumber daya yang dimaksudkan, bukan hanya membalas masalah finansial saja. Melainkan meliputi masalah kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas maka kemiskinan yang diukur dari kekayaan secara lain dapat dengan standart baku yang dikenal dengan sebutan garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

b. Kemiskinan Politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat seseorang dengan kekuasaan (*power*). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan seseorang dalam menjangkau dan menggunakan *resources*

c. Kemiskinan Sosial

Secara sosial kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam meningkatkan produktifitas. Dari aspek-aspek diatas dapat diartikan bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

3. Tujuan Umum Tentang Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat dan pada akhirnya kemiskinan merupakan persosialan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa yang senantiasa

menarik perhatian bernagai kalangan, baik para akdemisi maupun para praktisi untuk menyibak tirai dan mungkin misteri mengenai kemiskinan ini.

Kemiskinan bukan saaja berurusan dengan persoalan ekonomi belaka, melainkan juga bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Karena sebab multidimensional tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial saja, nakan tetapi lebih dari itu.

Dalam diskursus mengenai kemiskinan ini sendiri, ada tiga pandangan yang berkembang, yaitu konservatisme, liberalisme dan radikalisme. Penganut masing-masing pandang memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang bahwa kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau berkerja keras, boros tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis dan tidak ada hasrat untuk berprestasi.

Menurut Oscar Lewis, orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakiup psikologis, sosial dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanya semacam realistik dan situasional adaption pada lingkungan yang penuh diskrimsi dan peluang yang sempit. Sedangkan kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekan

peranan struktur ekonomi, politik dan sosial memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif.²⁴

Implikasi kemiskinan yang melibatkan pandangan-pandangan tersebut menjadikan kemiskinan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Memahi kemiskinan tentunya tidak hanya dapat dilihat dari satu segi dan satu sudut pandang saja, melainkan harus mampu membacanya dalam kerangka multi disiplin yang komprehensif. Secara sederhana, sebagaimana yang dinyatakan oleh Parsudi Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Kemiskinan telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi mereka yang miskin, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kemiskinan juga disinyalir pada seluruh aspek kehidupan, tingkat kesehatan masyarakat yang terabaikan, aspek kualitas pendidikan yang tidak merata, marginalisasi, dalamnya jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih kawatirnya lagi munculnya

²⁴Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 11

²⁵Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkoataan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 10

kriminalisasi, misalnya, aksi pencurian, perampokan, penjarahan yang dimotori oleh kemiskinan. Kenyataan ini kembali menguatkan bahwa kemiskinan merupakan penyakit sosial yang harus segera diatasi.²⁶

4. Karakteristik Masyarakat Miskin

Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan. Pendapatan suatu rumah tangga dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu berusaha, bekerja, dan perolehan dari pemilikan aset. Rumah tangga miskin biasanya tidak atau sangat sedikit memiliki aset yang dapat mendatangkan penghasilan. Sumber pendapatan yang pertama, yaitu berusaha dengan skala sangat kecil-kecil atau bekerja sebagai buruh, kedua hal inilah yang paling mungkin untuk ditingkatkan, terutama bagi mereka yang memang ingin bekerjadan berusaha.

Masyarakat miskin digolongkan menjadi dua yaitu fakir dan miskin. fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya.²⁷

Kemiskinan membuat manusia menderita dan terhambat mengembangkan kemanusiaannya. Penderitaan ini nyata dalam realitas merebaknya kasus-kasus seperti penyakit busung lapar, kekurangan gizi dan penyakit lainnya di beberapa daerah indonesia menurut meneth kelompok yang memiliki ketidak mampuan

²⁶Wildana Warga dinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 7-9

²⁷Muhtadi Ridwan, *Ibid.*, hlm. 4

mengakibatkan masyarakat yang tergolong miskin berperilaku dan berpola hidup miskin, yang pada dasarnya tidak menikmati kemerdekaan untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi.²⁸

5. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an didefinisikan seseorang yang dikatakan miskin sebagai golongan manusia yang lemah dalam kelompok masyarakat. Sebagai konsepnya Al-Qur'an menempatkan orang-orang miskin sebagai golongan sosial yang perlu dibantu, diperlakukan dengan baik dan diberikan perlindungan.

a. Membantu Orang Miskin

Adapun dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 33 menyatakan:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepadaibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan” dan apa saja kebaikan yang kamubuat. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah : 33)

Dalam ayat di atas diketahui bahwa ada beberapa orang yang kepada mereka dianjurkan untuk diberikan infak (nafkah) yaitu orang tua, kerabat, anak yatim orang

²⁸Meneth, *Pengembangan Masyarakat Desa*, (Penerbit USU Prees: Medan, 2005), hlm. 45

miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Penyebutan orang miskin sesudah orang tua, kerabat, dan anak yatim mengandung arti penting terhadap kedudukan orang miskin sebagai golongan manusia yang perlu diberikan infak (nafkah). Bagi mereka yang tergolong dalam kategori keluarga mampu, mempunyai orang tua, kerabat yang mampu, dengan sendiri harus memberikan prioritas bantuan terhadap para anak yatim dan orang miskin.²⁹

Perbuatan memberi nafkah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir tersebut merupakan perbuatan kebajikan. Kebajikan dalam konteks ayat di atas, menurut sayyid Quthub mengandung pengertian, yaitu

1. Maksud yang diinfakkan itu adalah kebajikan mengandung kebaikan bagi pemberi, penerima, dan masyarakat, kebajikan itu sendiri adalah amalan yang baik, pemberian yang baik, dan sesuatu yang baik
2. Hendaklah orang yang memberikan infak itu memilih yang terbaik dari apa yang ia miliki dan berbagai rasa dengan orang lain dalam kebaikan
 - b. Perlakuan orang baik terhadap orang miskin

Dalam Al-Qur'an menyatakan, perlakuan orang baik terhadap orang miskin ialah:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

²⁹Arraiyyah, M Hamdan, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2007), hlm. 65

Artinya: Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. (QS. Ad-Dhuha: 10)³⁰

Ayat ini mengandung larangan untuk mencela peminta-minta karena kemiskinan mereka. mereka itu hendaknya diberi makan (bantuan) atau ditolak dengan lemah lembut. Ayat di atas sejalan dengan firman Allah swt yang menyatakan bahwa:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun (QS Al-Baqarah: 263)³¹

Sedekah yang diikuti dengan cacian tidak di perlukan. Ucapan yang baik yang lemah lembut lebih baik dari itu. Ucapan yang baik membalut luka hati dan mengisinya dengan perasaan ridho. Maaf itu menghapus kebencian jiwa dan menggantinya dengan persaudaraan.

Di samping itu tutur kata yang baik bagi orang yang tidak mampu beredekah dengan harta merupakan amal sholeh yang sejalan dengan tujuan sedekah boleh jadi

³⁰Al-Qur'an dan Terjemahan, *ibid.*, hlm 596

³¹Al-Qur'an dan Terjemahan, *ibid.*, hlm 44

pada tutur kata yang baik itu dapat bantuan yang bersifat material bagi orang yang meminta.³²

c. Perlindungan bagi orang miskin

Allah swt berfirman

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak, keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu., jika iya kaya janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa' 135)³³

F. Strategi Mengatasi Kemiskinan perspektif Islam

Kemiskinan adalah musibah yang harus dihapuskan, ada yang kaya, ada yang miskin dan diantara keduanya, ada yang terkaya dan ada pula yang termiskin. Seseorang yang mendapatkan rezeki sehingga termasuk kelompok orang kaya (*aghniyah*) dan ada seseorang yang memperoleh rizki yang kurang sehingga termasuk kelompok orang miskin (*masakin*).

³²Arraiyyah. M Hamdar, *ibid*, hlm. 121

³³Al-Quran dan Terjemahan, *Ibid.*, hlm. 101

Hal tersebut memberikan adanya kebesaran Allah, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?³⁴

1. Rekonstruksi Teologi Kemiskinan

“Kemiskinan yang disandang oleh orang miskin dan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya merupakan kehendak dan takdir Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, Dia bisa menjadikan semua manusia menjadi Qarun. Tetapi Tuhan sengaja membatasi rezeki untuk orang yang dikehendaknya, untuk menguji mereka”. Ungkapan tersebut merupakan bentuk pembelaan yang sering dilontarkan oleh orang miskin. Hal tersebut disebabkan karena keyakinan mereka bahwa kemiskinan adalah takdir dan kuasa Tuhan, sebuah keyakinan fatalistik.

Rekonstruksi teologi yang penulis maksud, adalah bagaimana merubah cara pandang dan logika berpikir tentang kemiskinan. Kemiskinan lahir bukan semata-mata disebabkan oleh faktor takdir, melainkan lebih kepada penganiayaan terhadap diri sendiri. Hal ini senada dengan arti etimologis miskin itu sendiri, yaitu diam atau tidak bergerak. Dari sini diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan

³⁴Al-Quran dan Terjemahan, *Ibid.*, hlm 269

adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak mau bergerak atau berusaha, dan keengganan berusaha adalah bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri.³⁵

Padahal Allah swt, telah menjamin riski setiap orang dimuka bumi. Kewajiban setiap individu adalah berusaha mencarinya dan keluar dari rongrongan kemiskinan. Allah berfirman dalam QS. Hud ayat 6 dan QS. Al-Dzariyat ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (QS. Al-Dzariyat 51 : 58).

2. Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan.

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja. Masalahnya sekarang, apa dosa orang-orang yang lemah yang sudah tidak mampu lagi bekerja? Apa masalah janda yang ditinggal mati suaminya, sementara mereka tidak memiliki simpanan harta yang tidak cukup?.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetap juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya. Dalam konteks ini, hemat penulis, saat diperlukan adanya kesadaran bersama yang harus dibangun guna mengatasi kemiskinan, baik kesadaran tersebut sifatnya personal atau individu yang dia lakukan oleh masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya.

³⁵M.Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Ke Indonesiaan*, hlm. 167

Pertama, kesadaran personal atau individu dalam upaya mengatasi kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang tidak kalah penting. Bahkan kesadaran personal tersebut telah digagas pula oleh Al-Qur'an. Cukup ayat al-Qur'an yang mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan, dan berani berkorban. Hal itu bisa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahkan harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

Kedua, peran pemerintahan. Telah penulis singgung sebelumnya, aspek pemerintahan bukan merupakan sarana utama. Namun demikian, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat yang ketidak berpihakkan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Indonesia sebagai negara penganut konsep welfare state (negara sejahtera) seharusnya sudah mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, namun dalam realitasnya hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Namun demikian, penulis masih sangat berharap, komitmen pemerintah yang besar dalam mengatasi kemiskinan ini dapat menghasilkan pertumbuhan yang inklusif; pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin, dibukaknya sektor lapangan kerja seluas-luasnya agar angka pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perbaikan sektor sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat melahirkan SDM yang lebih baik, dan lain sebagainya sehingga mampu menciptakan pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata.

3. Membangun Etos Kerja Individu

Tawaran yang terakhir dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Berbeda dengan dugaan sementara orang yang beranggapan bahwa Islam kurang menyambut baik kehadiran harta. Pada hakikatnya, pandangan Islam terhadap harta sangat positif. Manusia yang di perintahkan Allah swt, untuk mencari rezeki bukan hanya mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk mencari apa yang diistilahkan dengan fadlullah, yang secara berarti kelebihan yang bersumber dari Allah swt.³⁶ Kelebihan yang bersumber dari Allah tersebut hanya bisa digapai melalui faktor etos kerja yang dimiliki seseorang.

Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Menurut Musa Asy'ari, etos kerja adalah rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam berkerja, yang kemudian membentuk semangat yang membedakannya, antara yang satu dengan yang lainnya. Etos kerja dalam Islam dengan demikian merupakan refleksi pribadi seseorang yang bekerja dengan pertumpu pada kemampuan konseptual yang bersifat kreatif dan inovatif.³⁷

Etos kerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan

³⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 165

³⁷Musa Asy'ari, "*Etos Kerja Islam Sebagai Landasan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan*" dalam Moh. Ali Aziz (ed), *Dakwah Oemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 35-36

masyarakat. Dalam etos kerja terkandung spirit atau semangat untuk mengubah sesuatu menjadi jauh lebih baik. Dengan etos kerja pula, kemiskinan dapat diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.

G. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Kemiskinan terjadi tentunya pasti ada fakto-faktor penyebabnya. Dibawah ini ada dua faktor-faktor penyebab manusia, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab kemiskinan secara manusia

- a) Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, malas berpikir dan berkerja.
- b) Tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat
- c) Pendidikan rendah
- d) Populasi penduduk yang tinggi
- e) Pemborosan dan kurang menghargai waktu³⁸

2. Faktor-faktor penyebab kemiskinan secara non manusia

- a) Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit
- b) Keterampilan atau keterisolasi desa
- c) Sarana perhubungan tidak ada
- d) Kurang fasilitas umum
- e) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa
- f) Kepemilikan tanah kurang pemerataan³⁹

³⁸Yuli Hastadewi, *Keluarga* (Penerbit Yayasan PKPA: Medan, 2000), hlm. 30

H. Mengatasi Kemiskinan

Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat miskin tidak selalu di pandang rendah karena mereka bisa diberdayakan. Masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan lintas sektoral dalam mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. kebijakan-kebijakan yang diambil diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terarah yang dimaksudkan adalah pertumbuhan yang merata dan dapat “menyentuh” penduduk miskin. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraannya.⁴⁰

Hal ini yang dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relatif tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dilihat dari diagram diatas menggambarkan suatu upaya yang saling terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan, karena masalah kemiskinan harus melibatkan antar sektor dan lembaga yang terkait.

³⁹*Ibid.*, hlm. 33

⁴⁰Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 13

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, masing-masing antara lain sebagai berikut:⁴¹

1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan

⁴¹Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Humaniora, 2004), hlm. 73-

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

I. Teori mengatasi kemiskinan

1. Pembangunan masyarakat terpadu

Menurut Waterston ada elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan ini yaitu pembangunan pertanian dengan menggunakan pertanian padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja skala kecil dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek.⁴²

Dari titik tersebut pemerintahan harus memangkas pengangguran yang ada di Desa Teluk Pulau dengan melakukan berbagai pelatihan kerja agar keahlian masyarakat dapat terasah dengan baik sehingga masyarakat dapat menggunakan keahliannya itu untuk membuat industri di Desa Teluk Pulau yang lebih beragam, semakin kompleks sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memajukan roda perekonomian di Desa Teluk Pulau.

⁴² Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 45-46

2. Perbaiki Pangan

Perbaiki pangan dalam pandangan Djiwandi tanaman pangan yang banyak diusahakan oleh petani padi sebagai penghasilan beras. Oleh karena itu pemerintahan desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diantaranya menstabilkan pertanian agar mendapatkan panen yang berkualitas sehingga padat memenuhi kebutuhan kebutuhan pangan desa ditujukan untuk memakmurkan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Menurut para ahli tentang mengatasi kemiskinan adalah yaitu:

- 1) Menurut Waterston ada elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan ini yaitu pembangunan pertanian dengan menggunakan pertanian padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja skala kecil dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁴
- 2) Menurut Prayitno (1996), mengatasi kemiskinan adalah:⁴⁵
 - a. Program mengatasi kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif apabila ada suasana tentram dan stabil. Kestabilan mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program mengatasi kemiskinan karena pada dasarnya upaya mengatasi kemiskinan adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial dan politik

⁴³*Ibid.*, hlm. 46

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 45

⁴⁵Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 8-9

- b. Program mengatasi kemiskinan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu dari faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran mengatasi kemiskinan.
- c. Program mengatasi kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari yang terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.

J. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ingin meneliti ada beberapa peneliti terdahulu memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan saya lakukan, di antaranya adalah

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Syuron Munjzi, Skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Berjudul: *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm)-Mandiri*. (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta). Kesimpulan tersebut yaitu: Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM-Mandiri memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan usaha serta tentang konsep dan implementasi program PNPM-Mandiri yang fokusnya pada pemberdayaan masyarakat partisipatoris.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kurniawan Ginting mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Dakwah pada tahun 2008. Berjudul: *Strategi Program Penganggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Ditinjau Sudut Pandang Islam Di Kelurahan Kota Madya Tebing Tinggi*. Kesimpulan tersebut yaitu: Penelitian ini menjelaskan cara konseptual penanganan yang dilakukan untuk masyarakat miskin, terhadap penganggulangan kemiskinan dikelurahan rambong kota madya Tebing Tinggi, salah satu program bantuan pemerintahan dengan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat kota Tebing Tinggi. Adapun upaya hambatan terus dilakukan oleh P2KP untuk membatasi kemiskinan.

Ketiga, Pada penelitian terdahulu yaitu skripsi tahun 2013 atas nama Abdur Rohim dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata” menyatakan bahwa penelitian tersebut memberdayakan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Dikarenakan desa wisata banyak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata sehingga masyarakat yang tidak berdaya perlu diberdayakan untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.⁴⁶

Sedangkan titik fokus pembahasan penulis adalah strategi Pemerintahan Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau. Penelitian ini membahas

⁴⁶ Abdur Rohim, “pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata”, skripsi sarjana sosiologi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013) hlm 22, t.d

mengenai strategi yang digunakan agar program mengatasi kemiskinan dapat tercapai hasil sesuai dengan harapan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Pemerintah Teluk Pulau

Sejarah berbentuk wilayah dan pemerintah teluk pulau yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah pemerintah teluk pulau sebelumnya, namun dapat dijelaskan disini bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah dan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Desa Teluk Pulau berbagi atas 13 (tiga belas) wilayah dusun dengan kode wilayah 14-06-07-2002.

Gambaran umum kondisi Teluk pulau adalah deskripsi tentang karakteristik berbagai sumber daya Pemerintah yang berhubungan atau terkaitnya dengan pembangunan di Pemerintah tersebut. Kondisi yang dibahas meliputi.

- a. Kondisi Geografis
- b. Perekonomian
- c. Sosial budaya

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Teluk Pulau terletak pada koordinat Lintang Selatan dan Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir mempunyai luas dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara dengan Pulau jemur
- Sebelah Selatan dengan Panipahan Darat
- Sebelah Timur dengan Selat Malaka
- Sebelah Barat dengan Desa Sei. Nahodaris (Sumatera Utara)

3. Perekonomian

Wilayah Teluk Pulai sebagian besar merupakan sektore Perikanan, perkebunan dan tanah pemukiman dan sebagai besar penduduknya bekerja sebagai Nelayan dalam perkembangannya, wilayah prikanan yang ada di Teluk Pulai telah berubah menjadi kawasan pertanian sehingga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Luas wilayah pemerintah Teluk Pulai adalah 24,317,78 hektar yang berbagai atas wilayah pemukiman, pertanian, dan perikanan.

Potensi sumber daya alam yang ada di Teluk Pulai sekarang ini selain masih tergantung pada pengelolaan perikanan (Laut) juga terdapat potensi lain dan jasa termasuk di dalamnya adanya sentra usaha makro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah berkembang di masyarakat.

Potensi sumber daya manusia yang ada di Desa dapat disekitarkan pada jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat sebagai berikut.

1. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

- a. Belum Sekolah/ TK : 542 jiwa
- b. Tidak Sekolah : 950 jiwa

- c. SD/MI : 3,556 jiwa
- d. SMP/MTs : 819 jiwa
- e. SMA/MA : 653 jiwa
- f. Diploma : 43 jiwa
- g. Sarjana : 88 jiwa

Tabel 1. Angkatan Kerja dan Persentase dari Jumlah Penduduk

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Pegawai Negeri Sipil	10 Orang	0.2 %
2	Buruh Harian Lepas	30 Orang	0,5 %
3	Pensiunan	5 Orang	0,1 %
4	Karyawan Swasta	15 Orang	0,2 %
5	Karyawan Honorer	20 Orang	0,3 %
6	Wiraswasta	651 Orang	9,9 %
7	Petani/Pekebun	357 Orang	3,5 %
8	Guru	78 Orang	1,2 %
9	Nelayan/Perikanan	1.121 Orang	17 %
10	Pedagang	30 Orang	0,5 %
11	Belum/Tidak Bekerja	653 Orang	10 %
12	Lainnya	30 Orang	0,5 %

Dari data tersebut diatas, mayoritas penduduk Desa Teluk Pulau bekerja sebagai Nelayan/Perikanan yaitu sebanyak 1,121 jiwa atau 17 %.

Tabel 2. Pendidikan Formal

No	Nama Sekolah	Jumlah			
		Sekolah	Ruangan	Siswa	Guru
1	Paud	3 buah	-	153	12
2	TK	3 buah	-	130	19
3	MDA	4 buah	-	190	17
4	SD/MI	5buah	-	1268	30
5	SMP/SEDERAJAT	3 buah	-	588	21
6	SMA/SEDERAJAT	3 buah	-	323	33

Tabel 3. Pendidikn Non Formal

No	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pondok Pesantren	-	-
2	Sekolah Luar Biasa	-	-
3	Balai Latihan Kerja	-	-
4	Kursus	1 buah	Kondisi Rusak

5	Pusat Latihan Kerja	-	-
---	---------------------	---	---

4. Sosial Budaya

Sejarah dengan pertumbuhan dan perkembangan Pemerintah, segi sosial dan budaya pemerintah juga berkembang, perkembangan sosial dan budaya meliputi: kualitas kehidupan beragama, permasalahan kesejahteraan sosial, pendidikan dan budaya.

a. Agama

Berdasarkan Agama, penduduk Desa Teluk Pulai tahun 2018 terdiri berbagai Agama, seperti Agama Islam, Agama Budha, sedangkan sisanya beragama Protestan, Katolik, Konghucu. Ada nya perbedaan agama tersebut tidak menimbulkan konflik antara masyarakat.

b. Angka Kemiskinan

Menurut hasil pendapatan penduduk miskin di Desa Teluk Pulai tahun 2019 yang diukur berdasarkan Pendataan Setiap ketua RT jumlah rumah tangga miskin di Desa Teluk Pulai pada tahun 2019 adalah 1.634 KK. Sedangkan, jika menggunakan asumsi bahwa angka kemiskinan sekitar 891 KK, penduduk Desa Teluk Pulai masih dibawah garis kemiskinan. Selanjutnya dengan menggunakan asumsi tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2019 jumlah penduduk Teluk Pulai mencapai 56,25 %.

c. Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial penduduk Desa Teluk Pulau dapat tercermin dari jumlah keluarga sejahtera yang ada diantara keluarga-keluarga penduduk. Dari total 1.634 kepada keluarga pasangan usia subur yang ada di Desa Teluk Pulau pada tahun 2019 baik peserta Keluarga Berencana (KB), sejumlah keluarga diantaranya adalah keluarga pra-sejahtera keluarga adalah keluarga sejahtera 1, keluarga adalah keluarga sejahtera 2 dan

5. Sosial Budaya Daerah

Jumlah penduduk di Desa Teluk Pulau Tahun 2019 sebanyak 6.852 jiwa terdiri atas laki-laki 3.522 jiwa dan perempuan 3.330 jiwa. Maka tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong “padat” namun jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata maka pada beberapa bagian wilayah ada yang berpenduduk “tidak padat” peningkatan tersebut menyebabkan adanya perbedaan penduduk yang lahir dan mati serta penduduk yang pindah dari desa tersebut.

Tabel 3. Sebaran penduduk pertahun 2019

Dusun	Luas (Ha)	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km²
Dusun 01 (Methodist)	2,936,28	490	

Dusun 02 (Karya)	4,65	450	
Dusun 03 (Dita Desa)	4,22	434	
Dusun 04 (Bandar Baru)	2,25	478	
Dusun 05 (Bintang Utara)	3,44	448	
Dusun 06 (Bintang Baru)	8,54	470	
Dusun 07 (Bintang Selatan)	108,72	957	
Dusun 08 (Tambusai)	3,862,79	584	
Dusun 09 (Teluk Pulau Darat)	2,461,79	651	
Dusun 10 (Kungsi)	4,233,86	523	
Dusun 11 (Ponorogo)	3,343,48	491	
Dusun 12 (Teluk Rukam)	3,431,77	315	
Dusun 13 (Kampung Baru)	3,913,99	561	
Jumlah	24,315,78	5,852	

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.⁴⁷ Pendekatan empiris berfungsi untuk menganalisis tentang permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15

Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif yakni analisis data yang tidak harus dilakukan dengan lokasi yang luas, dengan responden yang banyak, dan dengan keterangan yang banyak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau, di Desa Teluk Pulau. Sebagian penduduk bermata pencarian nelayan, dagangan, petani.

Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan turun langsung kelapangan di Desa Teluk Pulau Kecamatan pasir Limau Kapas dimulai sejak tanggal 18 Oktober sampai 30 Oktober 2019.

E. Informan Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berjudul Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas untuk memperoleh data yang akurat dilakukan wawancara dengan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Nama : Suyatno
Alamat : Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas
Pekerjaan : Camat Pasir Limau Kapas
Usia : 48 Tahun
2. Nama : Rusli
Alamat : Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas
Pekerjaan : Sekretaris Camat Pasir Limau Kapas
Usia : 45 Tahun
3. Nama : Mustofa Husen
Alamat : Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas
Pekerjaan : Pemerintah Kantor Desa
Pendidikan : S1
Usia : 40 Tahun
4. Nama : Rika
Alamat : Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas
Pekerjaan : Guru dan Pendamping PKK Desa Teluk Pulau
Pendidikan : S1

Usia : 38 Tahun

5. Nama : Rosidah

Alamat :Teluk Pulau Gg. Amal, Kecamatan Pasir Limau Kapas

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SD

Usia : 43 Tahun

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informasi Kaur Pemerintah Desa Teluk Pulau, Mustofa Husen, Rika sebagai masyarakat. Wawancara semi struktur memiliki tujuan yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta ide dan pendapatnya.

2. Observasi

Dalam penelitian kualitatif adalah teknik observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang ada di lokasi penelitian, kemudian mencatat

perilaku dan kejadian sebagai mana yang terjadi sesuai keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi nonpartisipatif. Observasi nonpartisipatif yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi dilakukan langsung di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, peraturan, kebijakan. Dalam penelitian ini dokumentasi berbentuk data ataupun laporan yang berkaitan dengan kegiatan mengatasi kemiskinan Desa Teluk Pulau di kecamatan pasir limau kapas.

G. Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh melalui informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai focus penelitian. Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, gambaran atau foto serta bahan-bahan lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalam bentuk kata-kata atau ucapan dari perilaku orang-orang yang diamati dalam penelitian ini, sedangkan bahan tambahan adalah non manusia. Milles dan Huberman dalam buku basrowi

mengemukakan bahwa pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data yang digunakan mencakup tiga kegiatan yaitu sebagai berikut;⁴⁸

1. Reduksi Data

Pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dilapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan menorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan lebih jauh, menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian.

3. Penarik kesimpulan

Kegiatan konfigurasi yang utuh. Tahap ini penelitian mencari makna dari data yang diperoleh dengan jalan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, dan hal-hal yang sering muncul ke dalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami, ditafsirkan dan dikategorikan sesuai dengan masalahnya. Dari data atau informasi

⁴⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 209-210

yang didapatnya mencoba mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Strategi Pemerintah Daerah Pasir Limau dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau

Strategi Pemerintah Daerah mengatasi kemiskinan tertuang dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 33 dan 34 bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya dituangkan dalam peraturan pemerintah upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012, bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional membuat lima strategi yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan dilaksanakan diseluruh Indonesia. Lima strategi tersebut ialah

1. Meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan

⁴⁹Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012

lapangan kerja yang produktif, menjaga produktivitas sektor pertanian menjadi fokus utama tanpa meninggalkan sektor lainnya. Meningkatkan infrastruktur wilayah tertinggal.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Bapak Suyatno selaku Camat Pasir

Limau

Untuk mengatasi kemiskinan kami selaku pemerintah memberikan bantuan Tunai dan Non Tunai bagi masyarakat baik pangan maupun uang tunai untuk pendidikan dan kesehatan mereka. Pelaksanaanya melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau KIS. Selanjutnya kami berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan keterampilan serta mengembangkan kewirausahaan.⁵⁰

2. Menetapkan kelompok menengah ke bawah dan melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan.

Wawancara dengan Bapak Mustofa selaku Pemerintah Desa mengatakan.

“Dalam pengentasan kemiskinan kami pemerintah desa, giat bekerja sama dengan PKK untuk melakukan banyak hal, baik pemberdayaan koperasi, mengajak masyarakat untuk ikut serta dan bisa membuat usaha bersama.”⁵¹

⁵⁰Suyatno, Camat Pasir Limau , *Wawancara Pribadi*, Rohil 18 Oktober 2019, pukul 09.13 WIB

⁵¹Mustofa Husen, Kaur Umum Pemerintah Desa Teluk Pulau, *Wawancara Pribadi*, Rohil 21 Oktober 2019, pukul 10.05 WIB

3. Melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan.
4. Peningkatan anggaran perlindungan sosial serta peningkatan infrastruktur dan investasi ekonomi.
5. Melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat agar implementasi berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Wawancara Bapak Mustofa mengatakan

untuk peningkatan perlindungan Sosial pemerintah memberikan bantuan sosial yang sudah lama berjalan di wilayah kami ini. Ikut arahan pemerintah pusat. Bantuan sosial yang kami berikan Rastra kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) yang digunakan untuk pendidikan dan kesehatan penerimanya. Ada juga kami namanya PIP (Program Indonesia Pintar) bantuan ini untuk pendidikan anak usia sekolah agar tidak ada permasalahan baik biaya maupun fasilitas masyarakat untuk pendidikan.⁵²

Dalam pengentasan kemiskinan di Desa Teluk Pulai, Pemerintah Daerah melakukan beberapa strategi yang telah dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan dan hal ini didapat berdasarkan wawancara dengan pemerintah daerahnya yaitu adanya bantuan Sosial baik berupa uang Tunai maupun Non Tunai yang direalisasikan melalui program Rastra, Program Keluarga Harapan, kemudian

⁵²Mustofa Husen, Kaur Umum Pemerintah Desa Teluk Pulai, *Wawancara Pribadi*, Rohil 21 Oktober 2019, pukul 10.35 WIB

Program Indonesia Pintar. Untuk kesehatan pemerintah memberikan bantuan dengan KIS Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemberdayaan koperasi dan peningkatan keterampilan juga menjadi strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau.

Dari titik itu maka sudah bisa dilihat bahwa strategi pemerintah daerah dengan Pemerintah Desa Teluk Pulau saling berkaitan satu sama lain dalam membuat gagasan cukup baik, karena pemerintah mempunyai cita-cita untuk memangkas pengangguran yang ada di Desa Teluk Pulau dengan melakukan berbagai pelatihan kerja agar keahlian masyarakat dapat terasah dengan baik sehingga masyarakat dapat menggunakan keahliannya itu untuk membuat industri di Desa Teluk Pulau yang lebih beragam, semakin kompleks sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan memajukan roda perekonomian di Desa Teluk Pulau.

Peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut Thomas Soebroto, pelayanan kesehatan masyarakat sebagai suatu pelayanan yang diberikan pada masyarakat sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Menurut Mustofa Husen untuk kesehatan di Desa Teluk Pulau sudah cukup bagus dan bisa ditangani seperti halnya setiap minggu ibu-ibu PKK melaksanakan program PSN dalam melaksanakan kegiatan ini ibu-ibu keliling kampung untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk membersihkan rumah dan

sekitarnya.⁵³ Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Pulau mengenai perlindungan kesehatan bagi masyarakat sudah baik karena secara langsung dapat menyadarkan masyarakat akan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan.

Dapat disimpulkan bawhasannya Strategi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau ialah pemerintah memberikan bantuan Tunai dan Non Tunai bagi masyarakat baik pangan maupun uang tunai untuk pendidikan dan kesehatan mereka. Pelaksanaanya melalui Program Keluarga Harapan dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau KIS. Untuk pendidikan PIP (Program Indonesia Pintar) bantuan ini untuk pendidikan anak usia sekolah agar tidak ada permasalahan baik biaya maupun fasilitas masyarakat untuk pendidikan

B. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Kecamatan Pair Limau Kapas Desa Teluk Pulau

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah

wawancara dengan Ibu Rika selaku Pendamping PKK

Kami telah melakukan sosialisasi kerumah-rumah mengajak masyarakat terutama ibu-ibu untuk ikut peran aktif baik dalam kegiatan ketrampilan pelatihan dan banyak lagi. Namun banyak yang tidak datang dengan alasan, mereka kerja tidak ada yang menjaga anak, dan ada juga yang bilang buat apa kumpul kan ga ada untungnya. Kami telah berusaha mengajak dan memberikan penjelasan bagi mereka namun tetap kesadaran akan pentingnya peningkatan keterampilan diri dan keluar dari kemiskinan masih rendah. Kebanyakan ibu-ibu disini pendidikan paling tinggi SMA masih banyak yang SMP.⁵⁴

⁵³Mustofa Husen, Kaur Umum Desa Teluk Pulau, *Wawancara Pribadi*, Rohil, 21 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB

⁵⁴Rika, Pendamping PKK, *Wawancara Pribadi*, Rohil, 23 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB

Sulitnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memerangi kemiskinan di dalam kehidupannya merupakan salah satu hambatan yang di hadapi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut, orientasi mereka hanya semata-mata ingin mendapat bantuan dana, dan tersebut tidak diproduktifkan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan usaha kerja, masyarakat di ajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang kurangnya berkualitas dari pengurus menjadi penghambat dalam manajemen yang kurang teratur dalam pengurusan. Padahal sangat dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang manajemen. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan Desa Teluk Pulau membuat desa ini rendah akan sumber daya manusia terbukti dengan angka 3.556 masyarakat hanya tamatan Sekolah Dasar dari jumlah penduduk 6.651. dapat dikatakan pendidikan di Desa Teluk Pulau masih rendah dan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

Terbukti dengan wawancara bersama Pak Mustofa

Masyarakat di Desa Teluk Pulau masih kebanyakan tamatan SD dan SMP . mereka lebih senang bekerja mencari uang baik menangkap ikan maupun membantu orang tuanya. Bagi mereka pendidikan masih belum penting. Karena yang kami lihat rata-rata tingkat ekonomi masyarakat rendah. Dan itu

yang membuat mereka malas sekolah lebih enak kerja dapat uang dan bisa bantu orang tua.⁵⁵

3. Lapangan Kerja

Banyaknya masyarakat pengangguran maupun buruh lepas di Desa Teluk Pulau menjadi salah satu penghambat hal ini. Hal ini terjadi dikarenakan sedikitnya lapangan kerja di Desa Teluk Pulau dan rendahnya pendidikan baik keterampilan maupun keahlian yang dimiliki masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan Pemerintah Daerah memiliki hambatan yang harus diselesaikan yaitu masih banyaknya pengangguran yang disebabkan rendahnya lapangan kerja dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Teluk Pulau. Rendahnya semangat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan agar masyarakat Desa Teluk Pulau dapat keluar dari zona kemiskinan.

C. Keberhasilan Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau

1. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat

Pengentasan kemiskinan dimulai dari pelayanan pendidikan yang diberikan kepada keluarga dengan tujuan meringankan beban pendidikan bagi siswa dan

⁵⁵Mustofa Husen, Kaur Umum Pemerintah Desa Teluk Pulau, *Wawancara Pribadi*, Rohil 21 Oktober 2019, pukul 10.55 WIB

keluarga. Agar memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun . kebijakan yang dilakukan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Bos diperuntukkan untuk pelaksanaan pendidikan sedangkan BKM diberikan berupa beasiswa bagi siswa wajib belajar dari keluarga miskin.

Hal ini sejalan dengan wawancara Ibu Rosidah

Alhamdulillah anak ibu dapat bantuan dari sekolah bantuan dana BOS gt katanya. Bisa buat beli perlengkapan sekolah, buat uang jajan. Tambah lagi anak ibu semakin rajin sekolah tanpa malu karena pakaiannya sudah jelek. Kadang kesian tapi mau gimana, ibu cuma ibu rumah tangga , suami ibu cuma tukang dodos sawit orang. Bersyukur kali ibu adanya bantuan pemerintah untuk anak sekolah.⁵⁶

Hasilnya banyak siswa dan keluarga merasakan dampaknya dan tidak ada siswa yang putus sekolah dikarenakan biaya pendidikan dengan adanya bantuan pendidikan bagi siswa sekolah.

Peningkatan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin terselenggara dimana pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya, serta adanya rawat inap kelas III dirumah sakit. Kebijakan dilakukan dengan menyalurkan bantuan dana pelayanan kesehatan ke puskesmas dan pelayanan kesehatan di kelas III RS dengan sistem klaim.

2. Meningkatkan Kualitas SDM

Peningkatan sumber daya manusia dilakukan untuk kemajuan wilayah dan masyarakat. Pemerintah daerah Pasir Limau meningkatkan SDM melalui cara yaitu :

⁵⁶Rosidah, Ibu Rumah Tangga, wawancara Pribadi, Rohil, 25 Oktober 2019, Pukul 16.45 WIB

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan
- b) Menambah lapangan kerja yang memadai
- c) Peningkatan perekonomian masyarakat

Hasil yang didapat pemerintah dengan adanya peningkatan sumber daya manusia ialah Desa Teluk Pulai ini memiliki manusia-manusia yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dengan ketersediaan lapangan pekerjaan maka kedepan warga Desa Teluk Pulai bisa memiliki pekerjaan, terus member bantuan pembangunan rumah layak huni.

3. Meningkatkan Ekonomi

Peningkatan dan perbaikan fasilitas infrastruktur khususnya jalan, jembatan, pelabuhan maka diharapkan cost transportasi dalam daerah lebih murah dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lancar muaranya adalah pemerataan pembangunan antara satu kawasan dengan kawasan lain.

Dari keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulai dapat disimpulkan ialah siswa dari keluarga miskin dapat kembali sekolah tanpa harus memikirkan biaya sekolah dengan bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Bos diperuntukkan untuk pelaksanaan pendidikan sedangkan BKM diberikan berupa beasiswa bagi siswa wajib belajar dari keluarga miskin. Untuk kesehatan pemerintah berhasil bekerja sama dengan Puskesmas dan menyediakan Rumah Sakit Rawat Inap untuk masyarakat. Meningkatnya keterampilan masyarakat dan pendidikan dengan

pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dengan bantuan PKK dan PKH di Desa Teluk Pulau. Berhasil mengurangi biaya transportasi kebutuhan pokok dengan perbaikan infrastruktur jalan di desa Teluk Pulau yang selama ini menjadi penyebab mahalnya kebutuhan pokok di desa ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi yang telah dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan Sosial baik berupa uang Tunai maupun Non Tunai yang direalisasikan melalui program Rastra, Program Keluarga Harapan, kemudian Program Indonesia Pintar. Untuk kesehatan pemerintah memberikan bantuan dengan KIS Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemberdayaan koperasi dan peningkatan keterampilan juga menjadi strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau

Hambatan yang dialami Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat disimpulkan ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari zona kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat yang kebanyakan hanya tamatan SD. Minimnya lapangan kerja menjadi penghambat dan menjadikan pemerintah harus mampu menyiapkan lapangan kerja agar kemiskinan berkurang. Ekonomi masyarakat agar menjadi lebih baik.

Ada beberapa keberhasilan yang diperoleh Pemerintah Daerah Pasir Limau dalam pengentasan kemiskinan ialah peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan sudah sadar akan pentingnya pendidikan agar keluar dari zona kemiskinan keluarga.

B. Saran

Pertama, untuk mengurangi kemiskinan di Desa Teluk Pulau, sebaiknya Pemerintah Daerah terus secara aktif mengadakan program pelatihan dan pemberdayaan agar masyarakat miskin di Desa Teluk Pulau dapat maju dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, seharusnya dalam menjalankan program-program mengatasi kemiskinan Pemerintah Daerah Teluk Pulau dan masyarakat harus saling bersinergi satu sama lain dengan mengangkat lagi budaya gotong royong, rapat, protes agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Ketiga, kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung setiap aktifitas dari pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan mengatasi kemiskinan dan lingkungan masyarakat. *Keempat*, bagi para Dermawan diharapkan bantuannya dalam bidang material untuk menjadi sumber potensi mendasar organisasi.

Melalui tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang memiliki sifat given, taqdir, melainkan lebih merupakan hasil konstruksi sosial, sehingga perlu adanya rekonstruksi teologis dalam memandang kemiskinan. Selain itu kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi bagi yang bersangkutan, oleh sebab itu, membangun kesadaran bersama, baik personal maupun pemerintah adalah hal yang niscaya. Namun demikian, ikhtiyar dan etos kerja menjadi modal utama untuk melawan kemiskinan tersebut, melalui langkah-langkah mengatasi kemiskinan tersebut, hemat penulis, merupakan satu instrumen besar dalam membangun kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press, 2015.
- Asy'ari, Musa "Etos Kerja Islam Sebagai Landasan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan" dalam Moh. Ali Aziz (ed), *Dakwah Oemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Bambang Rudito, *Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama 2016)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Humaniora, 2004.
- Hastadewi Yuli, *Keluarga*, Penerbit Yayasan PKPA: Medan, 2000
- Jamaludin Adon Nasrullah, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: PT Alumni 2004.
- Juni Priansa Donni, *Pengembangan Strategi Dan Model Pembelajaran*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Kamus Pelajar, Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional,
- Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Meneth, *Pengembangan Masyarakat Desa*, Penerbit USU Prees: Medan, 2005.

- M HamdanArraiyyah,, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- NdrahaTaliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ridwan Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Rohim Abdur, "pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata",skripsi sarjana sosiologi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Santosa Budi, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Sjafari Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Suharto Edi, *Kemiskinandan Perlindungan Sosial di Indonesia,Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, Bandung : Alfabeta, 2009
- SuparlanParsudi, *Kemiskinan di Perkoataan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Suyanto Bagong, *Anatomi Kemiskinan*, Malang : Intrans Publishing, 2013.
- SyafiieInu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: RefikaAditama, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1991.
- Usman Sunyoto,*Pembanguan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

WargadinataWildana, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Parktik*, Jakarta: Penerbit Kencan, 2013.

JURNAL

Sri Wahyuningsih, *Diversifikasi Pertanian menuju pertanian Tangguh Dalam UpayaMemantapkan Struktur Ekonomi Pedesaan*, Jurnal Pertanian Di Unduh pada Sabtu 26 Oktober Pukul 09.30 WIB

Rika.I.K.A Mantiri, Debby C.H Rotinsulu, Sri Murni, *Jurnal Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Di Kecamatan Domuga*
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/10766/10354>
diunduh Rabu 23 Oktober 2019 Pukul 13.00 WIB.

Imam Nawawi, Yudi Ruyadi, Siti Komariah, *Jurnal Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung*, <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/viewFile/1528/1054>, Di Unduh pada Rabu 23 Oktober 2019 Pukul 23.10 WIB

Wawancara

Mustofa Husen, Kaur Umum Pemerintah Desa Teluk Pulai, *Wawancara Pribadi*, Rohil 21 Oktober 2019, pukul 10.05 WIB

Rika, Pendamping PKK, *Wawancara Pribadi*, Rohil, 23 Oktober 2019, Pukul 08.35 WIB

Rosidah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Rohil, 25 Oktober 2019, Pukul 16.45 WIB

Daftar Wawancara

A. Identitas Informan

- 1 Nama :
- 2 Pekerjaan :
- 3 Alamat :
- 4 Pendidikan Terakhir :
- 5 Usia :..... Tahun

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana kemiskinan di Desa Teluk Pulau ?
2. Apa penyebab kemiskinan di Desa Teluk Pulau ?
3. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah Pasir Limau ?
4. Bantuan sosial apa saja yang diberikan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ?
5. Strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau?
6. Bagaimana keberhasilan pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau?
7. Bagaimana Hambatan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau ?
8. Bagaimana Respon masyarakat dengan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah ?

9. Bagaimana peran masyarakat ikut serta dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah ?
10. Apakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat bermanfaat ?

DATA RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

NAMA : Suprizal R
Tempat tanggal lahir : Panipahan, 06 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : H. M. Yamin Jln. Mabar 17 A
Nomor Hp : 082166197001

B. DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. 2003-2009 SDN 001, Kecamatan Pasir Limau Kapas
- b. 2009-2012 MTS Islahiyah, Kecamatan Pasir Limau Kapas
- c. 2012-2015 MA. Pondok Pesantren Darul Hikmah, Kisaran
- d. 2015-2019 Program Serjana (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 10 Januari 2020

Suprizal R
13154047

Dokumentasi



Buk PKK



Masyarakat Desa Teluk Pulai





Pengesahan Rumah Sakit

